

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010-2017

Wisniati Daluasih
Rudy Badrudin

E-mail: wduasih@gmail.com

ABSTRACT

This Study aims to analyze the influence of Local Revenue and equalization fund on the economic growth with capital expenditures as an intervening variabel in the Magelang Regency from 2010 to 2017. The type of data in this study is secondary data in the form of realization the APBD and Gross Regional Domestic Product (PDRB) Magelang Regency from 2010 to 2017. The result of this study indicate that: 1) local revenue had an insignificant effect on capital expenditure, 2) equalization had an insignificant effect on capital expenditures, 3) capital expenditures had an insignificant effect on economic growth.

Keywords: local revenue, equalization fund, capital expenditures, economic growth

JEL classification: O16, H72, R11

PENDAHULUAN

Keberlangsungan desentralisasi di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 lalu diperbarui oleh Undang-Undang No 33 Tahun 2004. Menurut Saragih dalam (Raharja, 2020), urutan

prosedur alokasi anggaran adalah desentralisasi fiskal dari pusat ke daerah, dalam tujuan sebagai unsur pendukung fungsi yang sudah diberikan pemerintah berkaitan dengan layanan pemerintahan yang sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan nasional salah satunya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seperti tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak terlepas dari aspek-aspek pendukungnya seperti politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan ekonomi. Aspek ekonomi yang baik tentu akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut. Diantara indikator membaiknya aspek ekonomi adalah Pertumbuhan Ekonomi yang positif. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pada aktivitas perekonomian masyarakat merupakan bentuk Pertumbuhan Ekonomi (Djojohadikusumo, 1994) dalam (Badrudin, 2017). Melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan dapat diketahui bagaimana pertumbuhan ekonomi. Penggunaan dasar harga konstan diyakini lebih akurat karena terlepas dari faktor inflasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan pemerintah untuk mengalokasikan Belanja Modal dimaksudkan untuk mendukung tercapainya Pertumbuhan Ekonomi. Belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk

membeli atau memperoleh aset berwujud bernilai guna satu tahun atau lebih yang kemudian dipakai untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Halim dalam (Badrudin, 2017) berpendapat belanja modal dapat dikategorikan menjadi; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Berdasarkan kategori tersebut dapat dikatakan Belanja Modal sangat diandalkan guna pembangunan infrastruktur serta berbagai fasilitas umum berbasis kepentingan masyarakat.

APBD memuat anggaran pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. "PAD diperoleh Daerah yang diambil berdasar Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah." (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Tingkat perolehan PAD tergantung kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksplor sumber daya yang ada. PAD memainkan peran kunci dalam meratakan kekuatan keuangan utamaya membiayai pengeluaran daerah sebagai bagian dari implementasi pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah selain PAD ialah Dana Perimbangan yang asalnya dari anggaran pusat yang dialokasikan untuk masing-masing daerah sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Pengalokasian Dana Perimbangan diharapkan dapat menopang daerah otonom dengan PAD yang relatif rendah.

Hingga saat ini pembangunan infrastruktur diyakini dapat menggerakkan berbagai sektor ekonomi seperti produksi dan konsumsi, dengan infrastruktur yang baik tingkat produksi dan konsumsi akan meningkat sehingga berdampak positif kepada Pertumbuhan Ekonomi. PAD dan Dana Perimbangan kerap disangkutpautkan dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. PAD dan Dana Perimbangan sebagai sumber pembiayaan Belanja Modal, pengalokasian Belanja Modal utamanya dipakai untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat terlepas dari pembangunan infrastruktur.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan variabel yang digunakan peneliti dalam peneliti seperti milik (Wiraswara et al., 2018) yang menyimpulkan bahawa dana perimbangan dan PAD berdampak signifikan kepada belanja modal serta pertumbuhan ekonomi, belanja modal berdampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi, serta dana

perimbangan dan PAD berdampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Selanjutnya, (Nurdiwaty et al., 2017) mengemukakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan kepada pengalokasian belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Kemudian, penelitian yang dilakukan (Irvan & Karmini, 2013) menarik kesimpulan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, namun belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten Magelang tahun 2010-2017.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menghubungkan antara pihak pertama (*principal*) yang berperan sebagai pemilik sumber daya, yang kemudian memercayakan kepemilikan sumber daya yang dimiliki kepada pihak lain (*agent*) untuk mencapai tujuan *principal*. Menurut Jansen & Mecking dalam (Raharja, 2020), munculnya teori keagenan karena adanya kesepakatan bersama antara *agent* dan *principal*, *agent* adalah pihak yang melakukan kegiatan operasional atau merealisasikan tujuan dari *principal*, sedangkan *principal* adalah pihak yang menyediakan dana atau memberikan imbalan kepada *agent*.

Interaksi antara *agent* dan *principal* berawal ketika *agent* memberikan pendapat dan berakir pada *principal* menerima atau menolak pendapat tersebut. Teori keagenan bermaksud untuk memecahkan konflik antara kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi antara *agent* dan *principal* disebut dengan *agency problems*. Penyebabnya adalah karena terjadi asimetri informasi. Apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan, pemerintah daerah tidak merealisasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berujung pada terjadinya penyelewengan dana. Dalam penelitian ini pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*.

Teori Desentralisasi Fiskal

Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, ada tiga asas mengenai desentralisasi yang digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman, yaitu: (1) Desentralisasi yang diartikan sebagai pemberian wewenang yang berasal dari pemerintah pusat pada daerah otonom dengan perintah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, (2) Dekonsentrasi yang berarti pelepasan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada instansi vertikal daerah, dan (3) Tugas pembantuan yang artinya pemerintah daerah melaksanakan tugas atas nama pemerintah.

Menurut Modhofar & Tahar dalam (Raharja, 2020), tujuan desentralisasi fiskal yakni: (1) Mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah baik pusat dan daerah maupun antardaerah, (2) Meningkatkan mutu pelayanan public serta mengurangi tingkat kesenjangan, (3) Melakukan pemanfaatan sumberdaya nasional dengan prosedur yang seefisien mungkin, (4) melakukan pelaksanaan secara efisien, tepat waktu dan adil dalam melakukan transparansi, tata kelola, dan bertanggungjawab, dan (5) Terciptanya stabilitas fiskal pada kebijakan ekonomi makro. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mneur Sasana dalam (Raharja, 2020)maka perlu memperhatikan beberapa hal yakni: Sistem pajak dan kredit daerah, transfer, sistem administrasi dan anggaran pemerintah pusat dan daerah, dan penerapan Sistem Pelayanan Minimal/SPM.

Bahl dalam (Raharja, 2020) menjelaskan bahwa dengan diberakukannya desentralisasi akan berdampak pada adanya persaingan antar pemerintah daerah untuk menjadi yang terbaik. Semakin banyaknya fasilitas public, pemerintah bersaing satu sama lain untuk memberikan yang terbaik apa yang diperlukan masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Djojohadikusumo dalam (Raharja, 2020) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah peristiwa terjadinya perubahan struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan sebagai proses transformasi, yang ditandai dengan adanya perubahan dasar dalam prosedur kegiatan ekonomi secara operasional dan struktrual masyarat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah runtut peristiwa yang dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

Tinggi rendahnya PAD berdasar bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengeksplor sumber daya PAD yang terdapat diwilayahnya. Namun, dalam upaya tersebut, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor (Undang-Undang Nomor 33 Taun 20014). PAD memiliki 4 (empat) komponen yaitu; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Pendapatan Lain-lain yang Sah.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerintahan antar daerah (badrudin, 2019).

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja Modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Hali (2008:4-5) dalam (Badrudin,2017) mengemukakan bahwa belanja modal adalah sebuah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat menurut Djojohadikusumo (1994:19) dalam (badrudin, 2017). Menurut (todaro smith,2006) pertumbuhan ekonomi memiliki tiga komponen utama, salah satu diantaranya adalah akumulasi modal yang mencakup semua bentuk investasi produktif yang berupa tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika didukung oleh modal fisik untuk tercapainya output yang lebih tinggi serta investasi lainnya yang berupa infrastruktur ekonomi dan sosial.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBD yang kemudian dialokasikan untuk berbagai keperluan belanja daerah salah satunya yaitu belanja modal. Belanja modal dialokasikan dengan tujuan untuk membuat mutu pelayanan publik meningkat dengan kenaikan aktiva tetap pemerintah daerah, seperti gedung, prasarana, peralatan dan aktiva tetap lainnya (Darwanto & Yulia, 2007) dalam (Wiraswasra *et al.*, 2018).

Penelitian yang dilakukan (Robert, 2004) dalam (Wiraswasra *et al.*, 2018) menjelaskan jika PAD berdampak terhadap DAU, sebab adanya DAU menjadi sumber dasar pendanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya, di sisi lain kekurangan dana diharapkan dapat digali dari basis pendanaan sendiri yaitu PAD. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Martini, 2014) menunjukkan bahwa DAU, DAK serta PAD mempunyai dampak yang positif dan signifikan bagi belanja modal. Sama halnya dengan penelitian (Nurdiwaty *et al.*, 2017) yang menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Positif terhadap belanja modal di Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017

Banyak studi terdahulu yang menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan berkaitan erat dengan belanja daerah, adapun yang menyatakan bahwa belanja daerahlah

yang mempengaruhi transfer dari pemerintah. Penelitian Legrensi dan Milas (2001) dalam (Wiraswasra *et al.*, 2018), memunculkan fakta jika dalam jangka panjang transfer pemerintah berdampak pada belanja daerah. Gamkar dan Oates (1996) dalam (Wiraswasra *et al.*, 2018) menganalisa tanggapan pemerintah daerah mengenai pergeseran nilai transfer dari pemerintah federal Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991 menunjukkan hasil jika pergeseran total transfer mengakibatkan penurunan pada pengeluaran daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty *et al.* (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di Jawa Timur.

H2: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017

Salah satu parameter dalam kegiatan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, perihal ini disebabkan pertumbuhan perekonomian dianggap mampu mengukur peningkatan ektivitas sektor-sektor ekonomi pada suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipakai sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan yang mendar oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi. Banyak aspek pendukung pertumbuhan ekonomi, diantaranya ialah terdapatnya distribusi anggaran yang cukup guna kegiatan pembangunan yang diambil dari belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Hakim dan Wijayanti (2014) dalam (Wiraswasra *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa belanja modal berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRB sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian (Irvan & Karmini, 2013) menyimpulkan bahwa belanja modal tidak dapat menjadi pemediasi hubungan antara PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H3: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017

Penelitian ini menggunakan data dari Kabupaten Magelang. Data tersebut terdiri dari (1) Data realisasi PAD, (2) Data realisasi dana perimbangan, (3) Data realisasi belanja modal, dan (4) Data laju

pertumbuhan ekonomi. Seluruh data diunduh dari situs web kementerian keuangan Indonesia (kemenkeu.go.id) kecuali laju pertumbuhan ekonomi yang diunduh dari situs web Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (magelangkab.bps.go.id). Data yang digunakan merupakan data selama tahun 2010-2017. Seluruh data diolah dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3 dan menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*).

Penelitian ini memiliki dua variabel independen untuk diuji yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan. Terdapat satu variabel dependen

yaitu pertumbuhan ekonomi. Kemudian variabel belanja modal digunakan sebagai variabel intervening.

HASIL PENELITIAN

Masing-masing data yang digunakan berasal dari Kabupaten Magelang dengan tahun periode 2010 sampai 2017. Totalnya terdapat 32 butir data yang diteliti sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Sedangkan Tabel 2 memuat informasi mengenai hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 1
PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah, Rp. *)	Dana Perimbangan, Rp. *)	Belanja Modal, Rp. *)	Pertumbuhan Ekonomi **)
1	2010	76.057.772.876	757.580.425.863	97.925.510.590	4,48%
2	2011	90.462.630.622	798.006.244.160	84.900.125.340	6,68%
3	2012	123.722.781.349	979.144.364.106	95.350.817.769	4,88%
4	2013	173.253.651.914	986.615.535.111	108.603.624.493	5,91%
5	2014	261.569.091.783	1.047.440.614.157	319.022.187.365	5,38%
6	2015	288.485.279.045	1.080.097.852.660	253.851.809.152	5,18%
7	2016	288.485.279.045	1.213.324.754.419	353.168.000.000	5,39%
8	2017	403.561.238.310	1.161.979.715.539	502.862.222.437	5,50%

Sumber: *) Kemenkeu.go.id

**) magelangkab.bps.go.id

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
PAD (dalam juta rupiah)	8	76.057	403.561	207.445	112.319
DP (dalam juta rupiah)	8	757.580	1.213.324	1.003.023	160.588
BM (dalam juta rupiah)	8	84.900	502.862	226.960	155.567
PE (%)	8	4,48	6,68	0,66	5,42

Nilai minimum dari variabel independen yang pertama yaitu PAD Kabupaten Magelang adalah Rp76.957.772.876 pada tahun 2010. Ini dapat terjadi karena realisasi PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah lebih rendah jika dibandingkan anggaran PAD. Sedangkan nilai maksimum PAD adalah Rp403.561.238.310 pada tahun 2017. Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah yang lebih tinggi dari anggaran yang ada dapat menjadi penyebab hal tersebut. Kemudian nilai rata-rata atau mean PAD di Kabupaten Magelang ialah Rp207.445.140.395,75 dan nilai standar deviasi PAD Kabupaten Magelang adalah Rp112.319.516.728,17.

Selanjutnya variabel independen yang kedua yaitu dana perimbangan memiliki nilai minimum Rp757.580.425.863 pada tahun 2010. Sedangkan nilai maksimum Dana Perimbangan adalah Rp1.213.324.754.419 pada tahun 2016. Untuk nilai rata-rata atau mean Dana Perimbangan adalah

Rp1.003.023.688.251,87 dan nilai standar deviasi Dana Perimbangan adalah Rp160.588.580.012,59.

Nilai minimum variabel intervening yaitu Belanja Modal Kabupaten Magelang adalah Rp84.900.125.340 pada tahun 2011 dan nilai maksimum Belanja Modal Kabupaten Magelang adalah Rp502.862.222.437 pada tahun 2017. Sedangkan mean atau nilai rata-rata Belanja Modal Kabupaten Magelang adalah Rp226.960.537.143,25 dan nilai standar deviasi Belanja Modal Kabupaten Magelang adalah Rp155.567.728.596,92.

Kemudian variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang nilai minimumnya adalah 4,48% pada tahun 2010 dan nilai maksimum Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang adalah 6,68% pada tahun 2011. Sedangkan mean atau nilai rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang adalah 5,42% dan nilai standar deviasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang adalah 0,66%.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa semua variabel yang diteliti memiliki nilai Cronbach's Alpha $1,000 > 0,60$ yang berarti bahwa seluruh variabel yang diteliti sudah

Tabel 3
Nilai Cronbach's Alpha

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,000
Dana Perimbangan	1,000
Belanja Modal	1,000
Pertumbuhan Ekonomi	1,000

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

	R-Square	Keterangan
<u>Belanja Modal</u>	0,876	87,6% variabel belanja modal dijelaskan oleh variabel PAD dan dana perimbangan, sedangkan 12,4% dijelaskan oleh faktor yang lain.
<u>Pertumbuhan Ekonomi</u>	0,015	1,5% variabel pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh variabel belanja modal, sedangkan 98,5% dijelaskan oleh faktor lain

Tabel 5
Hasil Uji Parsial

Hipotesis	Original Sample	Sample Mean	T Statistics	P Values	Kesimpulan
PAD -> BM	1,266	1,684	1,236	0,245	Tidak mendukung H1
DP -> BM	-0,353	-0,778	0,311	0,748	Tidak mendukung H2
BM -> PE	-0,124	-0,264	0,399	0,689	Tidak mendukung H3

reliabel. Selanjutnya, evaluasi model struktural yang dapat dilihat dari koefisien determinasi sebagaimana termuat dalam Tabel 4.

Nilai *path coefficient* digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai *P value*. Melalui nilai *P value* atau *t-statistik* dapat ditentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Penelitian ini menggunakan pengujian *one tail* sehingga diajukan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sebagai batas hipotesis diterima atau ditolak. Apabila nilai *P value* lebih dari tingkat signifikansi maka hipotesis ditolak, apabila *p value* kurang dari tingkat signifikansi maka hipotesis diterima. Berdasar Tabel 5, maka dapat diinterpretasikan bahwa i) PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal dengan *P value* 0,245 > 0,05 dan nilai *original sample* 1,266, maka arah hubungan PAD terhadap Belanja Modal adalah positif; ii) Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal dengan *P value* 0,748 > 0,05 dan nilai *original sample* -0,353, maka arah hubungan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal adalah negatif; dan iii) Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan *P value* 0,698 > 0,05 dan nilai *original sample* -0,124, maka hubungan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah negatif.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017

Hipotesis satu (H1) penelitian berbunyi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Positif terhadap belanja modal di Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan hipotesis pertama ditolak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PAD bepen-

garuh positif tidak signifikan kepada belanja modal di Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017 atau dapat dikatakan bahwa PAD tidak dapat menjadi penentu besarnya Belanja Modal. Belanja modal Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017 tidak dipengaruhi secara signifikan oleh PAD mungkin terjadi karena adanya pengaruh dari faktor-faktor lain misalnya seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil atau sisa lebih perhitungan anggaran.

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang telah dilaksanakan (Wiraswasra *et al.*, 2018) yang menyatakan bahwa “PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di kota dalam wilayah Jawa Timur selama tahun 2009-2014.” Sama halnya penelitian (Nurdiwaty *et al.*, 2017) yang menyatakan “PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di Jawa Timur.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017

Bunyi hipotesis dua (H2) penelitian ini ialah Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017. Hasil pengolahan data yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa hipotesis kedua ditolak atau dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan kepada belanja modal di Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017. Dana Perimbangan Belanja modal Kabupaten Magelang tahun 2010-2017 tidak dipengaruhi oleh dana perimbangan, begitu pula PAD tidak memengaruhi belanja modal secara signifikan sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan terbesar belanja modal Kabupaten Magelang tahun 2010-2017 dipengaruhi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 “SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan

dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.”

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilaksanakan (Nurdiwaty *et al.*, 2017) yang menyimpulkan “dana perimbangan berdampak positif kepada pengalokasian anggaran belanja modal.”

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017

Hipotesis ketiga (H3) penelitian ini adalah Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak atau dapat dikatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2010-2017. Hal ini mungkin terjadi akibat belanja modal pemerintah daerah kurang produktif, atau kemungkinan lain karena hasil pengalokasian belanja modal belum terealisasi secara keseluruhan atau pembangunan infrastruktur masih dalam tahap proses sehingga belum menunjukkan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan (Wiraswasra *et al.*, 2018) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi.” Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian (Irvan & Karmini, 2013) yang menarik kesimpulan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk meneliti pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten

Magelang dalam kurun waktu 8 tahun yaitu tahun 2010-2017. Simpulannya i) PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Magelang tahun 2010-2017. Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasar pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 0.3. Hasil pengujian menunjukkan nilai *p value* pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal di Kabupaten Magelang tahun 2010-2017 lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansinya ($0,203 > 0,05$); ii) Dana perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Magelang tahun 2010-2017. Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasar pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 0.3. Hasil pengujian menunjukkan nilai *p value* dana perimbangan terhadap belanja modal di Kabupaten Magelang tahun 2010-2017 lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansinya ($0,667 > 0,05$); dan iii) Belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2010-2017. Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasar pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 0.3. Hasil pengujian menunjukkan nilai *p value* belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2010-2017 lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansinya ($0,838 > 0,05$).

Saran

Penelitian selanjutnya perlu untuk menambah variabel-variabel lain misalnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) untuk menemukan apa yang sebenarnya mempengaruhi belanja modal secara signifikan. Kemudian penelitian selanjutnya perlu menambah rentang waktu pengambilan data, karena penggunaan rentang waktu yang lebih panjang akan lebih mampu menggeneralisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2015. *Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis*. UPP STIM YKPN.
- Arsyad, L., & Shodiq, A. 2014. Pengaruh Struktural Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja

- Keuangan Pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. *Lincoln Arsyad*.
- Ayu, I. A. P. M., & Sutrisna, I. K. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 1445–1471.
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2017*.
- Ghozali, I., & Latan, H. 2015. *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irvan, I. putu, & Karmini, N. L. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal EP Unud*, 338–362.
- Keynes, J. N., Ricardo, D., & Gonner, E. C. K. 1891. Principles of Political Economy and Taxation. *The Economic Journal*. <https://doi.org/10.2307/2956087>
- Martini, D. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2.
- Ningsih, E. K., & Noviaty, D. E. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 91. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.67>
- Nisa, A. A. 2017. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*.
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. 2017. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>
- Raharja, T. L. C. 2020. *Pengaruh Dana Desa dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Tahun 2015-2018*.
- Siswiyanti, P. 2015. *Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. 7(1), 1–17.
- Smith, A. 1776. *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*.
- Sulfadli. 2019. *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar*. III(April), 1–23.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi (9th d)*. Erlangga.
- Wiraswasra, F., Pudjiharjo, M., & Adis, M. P. 2018. Pengaruh Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2).
- Yusriati, C., Arfan, M., & Yahya, M. 2012. Pengaruh Pinjaman kerja dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia terhadap Laba Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syariah Kuala*.